



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak yang membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi / balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota). Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak) guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jenis – jenis pajak pusat : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh dinas pendapatan daerah/ DISPENDA).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan tidak dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari dalam negeri sehingga pada sektor ini penerimaan dalam negeri sangat diperlukan. Pemerintah berupaya setiap tahunnya penerimaan dalam negeri terutama dari pajak terus meningkat.

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengaturan PBB, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau yang disebut dengan UUPBB. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu pembagian persentase PBB antara desa/kel.kabupaten-provinsi dan pusat sudah tidak ada dikarenakan seluruhnya 100% untuk daerah. Pada prinsipnya secara administrasi terjadi perpindahan pencatatan hasil pemungutan PBB, jika sebelumnya penerimaan PBB tercatat pada keuangan negara(APBN) dalam penerimaan perpajakan, kemudian setelah mekanisme peralihan berjalan akan masuk dalam PAD khususnya pajak daerah. Undang-undang ini merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/ atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/ atau perolehan manfaat atas bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara, yaitu suatu jenis pajak yang dikelola oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktorat Jendral Pajak dengan Instansi Operasionalnya Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian menurut Pasal 18 UUPBB, menyebutkan:

- a. Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untuk pemerintahan daerah tingkat II dan pemerintah daerah tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan (pemerintahan daerah tingkat II sekarang adalah kabupaten sedangkan pemerintahan daerah tingkat I adalah pemerintah provinsi).
- b. Bagian penerimaan pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), sebagian besar diberikan kepada pemerintah daerah tingkat II (pemerintahan kabupaten).
- c. Imbangan pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Umumnya masyarakat yang tidak membayar PBB dikarenakan keadaan ekonomi dan tingkat pendidikan rendah, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk pajak. Disamping itu, ada juga orang yang memiliki perekonomian, pendidikan yang baik serta yang tahu seluk beluk pajak dan manfaat pajak bagi negara maupun bagi dirinya sendiri tidak membayar pajak atau tidak disiplin tepat pada waktunya membayar PBB. Maka, diperlukan sanksi dan alat paksa yang dapat digunakan untuk memaksa wajib pajak agar menerapkan kewajibannya dan sadar akan kewajibannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dispenda kota pekanbaru ini, masih banyak yang tidak patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena sifat malas yang masih ada pada diri mereka. Sanksi yang diberikan tidak membuat mereka jera akan penunggakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Buktinya masih banyak yang menunggak, tidak mau membayar, atau bersikap acuh-tak acuh terhadap pembayaran pajak. Karena itu target yang direalisasikan tidak tercapai 100%.

Tabel I.1

Target dan Realisasi PBB di DISPENDA Kota Pekanbaru dari Tahun 2013 sampai 2015

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase %
1	2013	Rp. 68.000.000.000	Rp. 45.850.030.100	67.42
2	2014	Rp. 75.000.000.000	Rp. 56.013.512.000	74.68
3	2015	Rp. 90.000.000.000	Rp. 70.830.500.000	78.70

Sumber : DISPENDA Kota Pekanbaru

Dapat dilihat dari tabel I.1 diatas bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2013 target PBB sebesar Rp. 68.000.000.000 dan terealisasi Rp. 45.850.030.100 persentasenya sebesar 67.42% dan tahun 2014 target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 75.000.000.000 dan terealisasi Rp. 56.013.512.000 persentasenya 74.68% mengalami peningkatan, dan pada tahun 2015 target penerimaan sebesar Rp. 90.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 70.830.500.000 persentasenya 78.70% di tahun 2015 mengalami peningkatan. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa target dan realisasi PBB sangat meningkat setiap tahunnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanksi administrasi bagi wajib PBB telah diatur dalam UU PBB yaitu Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2),(3) dan ayat (4) dan dalam Pasal II ayat (3) UUPBB adalah sebagai berikut:

- a. Denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP) walaupun sudah ditegur secara tertulis seperti yang dirumuskan dalam pasal 9 ayat (2) dan pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) UUPBB.
- b. Denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang bagi wajib pajak yang melaporkan data obyek pajak tidak benar (lebih kecil dari hasil pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak). Hal tersebut telah dirumuskan dalam pasal 10 ayat (2) huruf b dan ayat (4) UUPBB.

Dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran. Untuk jangka waktu paling lama 24 bulan untuk pajak terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak bayar atau pembayaran kurang, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (3) UUPBB.

Dalam menjatuhkan sanksi administratif dilakukan oleh aparatur negara yang terdiri dari fungsionaris/ pejabat atau lembaga negara yang diberi wewenang dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan segala ketentuan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang perpajakan.

Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dinas Pendapatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam melaksanakan penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi wajib pajak.

Untuk memudahkan wajib pajak menerapkan kewajiban membayar pajak, maka pemerintah menyediakan berbagai fasilitas untuk membayar pajak diantaranya adalah: Bank, Pos dan Giro, dan tempat lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian dan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, tetapi dilapangan dalam penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak semudah yang dibayangkan karena masih ada wajib pajak yang belum menyadari akan pentingnya pemenuhan kewajiban tersebut bagi dirinya dan negara, sehingga mereka belum mau membayar PBB. Oleh karena itu, petugas yang berwenang dalam pelaksanaan penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) ini harus meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul. Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 4 menjelaskan tentang mengenai pajak bumi bangunan perdesaan-perkotaan. Banyaknya tugas yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan ini bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, mahasiswa/i merasa perlu untuk mengetahui lebih dalam apa saja yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dalam mengelola penerapan sanksi administrasi ketidakpatuhan membayar pajak bumi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bangunan (PBB) bagi wajib pajak. Hal inilah yang penulis memilih Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru sebagai tempat penelitian dan memilih “**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN KOTA PEKANBARU** “ Sebagai objek yang menarik untuk dijadikan judul untuk tugas akhir saya.

Tabel I.II

**Daftar Wajb Pajak, Wajib Pajak yang Membayar, dan Persentasenya
Di Dispenda Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar	Persentase %
2013	152,317	123,654	81,18
2014	156,201	145,342	93,64
2015	176,321	164,121	93,08

Sumber: Dispenda Kota Pekanbaru

Berdasarkan dari tabel I.II diatas Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak 152,317 dengan jumlah wajib pajak yang membayar dengan persentase 81,18 di tahun tersebut. Pada tahun 2014 jumlah wajib pajaknya, yaitu 156,201 dengan jumlah wajib pajak yang membayar 145,342 dengan persentasenya 93,64 % dari tahun 2014, maka dari pembayaran wajib pajak 2013 - 2014 mengalami kenaikan persentasenya 12,46 %. Pada tahun 2015 jumlah wajib pajak 176,321 dengan jumlah wajib pajak yang membayar 164,121 dengan persentase 93,08 % dari

Berikut kutipan wawancaranya:

(Wawancara: data tahun 2015)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu, Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?

1.3.1 Tujuan Penelitian

1.3.2 Manfaat Penelitian

8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya penulisan yang dilakukan penulis di dinas pendapatan daerah kota pekanbaru dapat mempermudah penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir, dapat menambah wawasan penulis mengenai penerapan sanksi administrasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

b. Bagi Instansi

Dapat membantu pihak instansi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan penerapan sanksi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, dan memperoleh masukan bagi akademis tentang upaya untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tempat Penelitian

Penelitian di laksanakan di Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kota Pekanbaru.

1.4.2 Waktu Penelitian

Dari bulan Februari akan diselesaikan pada bulan April 2016.

1.4.3 Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama atau sumber asli langsung dari informasi. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang di peroleh secara tidak langsung melalui perantara diperoleh dan di catat oleh pihak lain. Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan catatan yang di perlukan.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik wawancara.

a. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru khususnya kepala seksi Pajak Bumi dan Bangunan, yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusunan penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Yaitu studi yang merupakan penilaian atas kesimpulan atau pendapatan baru yang memperkuat uraian atas pengutipan data. Buku-buku yang menjadi referensi merupakan buku-buku yang berkaitan dengan perpajakan secara umum dan buku-buku berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1.4.5 Analisis Data

Setelah data-data yang dikumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif. Kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun argumentasi dengan cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mendeskripsikan, membandingkan, menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan di lapangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, terdapat beberapa dan dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan dan menguraikan deskripsi atau gambaran umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, kemudian menjelaskan uraian tugas, serta struktur organisasi unit kerja Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, definisi pajak PBB, dasar hukum pajak bumi dan bangunan, subjek dan objek PBB, dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan PBB, tata cara penagihan pajak bumi dan bangunan, jenis sanksi PBB, penetapan sanksi PBB, pajak menurut pandangan islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang di temukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, kemudian memberikan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA